

# Model Sistem Responsibilitas Dan Akuntabilitas “Gapura Kota Model”

*by Sri Juni Woro Astuti*

---

**Submission date:** 10-Apr-2023 03:33PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2060409980

**File name:** Model\_Strategi\_Difusi\_Yuni\_-\_Sri\_Juni\_Woro\_Astuti.docx (166.52K)

**Word count:** 3186

**Character count:** 21909

**MODEL & STRATEGI  
DIFUSI INOVASI DALAM  
RANGKA PENINGKATAN DAYA  
SAING DAERAH MELALUI  
BADAN USAHA MILIK DESA**



Oleh  
**Dr. Sri Juni Woro Astuti, M.Com.**

**UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**  
**2018**

## 1. Pendahuluan

Keterbelakangan dan kemiskinan masih menjadi masalah pembangunan yang berkepanjangan. Dalam rilis terbaru BPS, jumlah penduduk miskin per September 2016 mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen). Jumlah ini menurun 250 ribu orang dibandingkan Maret 2016 yang tercatat 28,01 juta orang (10,86 persen). Namun hal yang perlu dicermati adalah disparitas jumlah penduduk miskin di perdesaan dan perkotaan. Berdasarkan data September 2016, jumlah penduduk miskin di perdesaan 17,28 juta orang (13,96 persen), sedangkan di perkotaan 10,49 juta orang (7,73 persen) (<http://www.transformasi.org/id/pusat-kajian/berita/perkotaan/>).

Desa memang masih selalu dikonotasikan dengan keterbelakangan dan kemiskinan, sehingga mendorong pemerintah pusat untuk mengalokasikan sejumlah dana guna mempercepat pembangunan dan pengentasan kemiskinan di perdesaan. Diharapkan dengan pengalokasian sejumlah dana yang cukup besar tersebut, desa mampu menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan mendorong kemandirian ekonomi masyarakatnya. Namun persoalan tidak sesederhana itu, ketersediaan dana yang memadai saja tanpa adanya konsep atau gagasan kreatif untuk menghasilkan inovasi tentu belum mampu menyelesaikan permasalahan mendasar penyebab kemiskinan dan keterbelakangan. Untuk mengatasi problem utama pembangunan ekonomi diperlukan suatu terobosan baru yang dapat mengakselerasi hasil-hasil pembangunan sebagai mana yang diharapkan khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan BUMDes merupakan salah satu bentuk inovasi yang diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. UU No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Namun sebagai sebuah inovasi tentunya belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal. Kenyataannya banyak desa yang gagal menjalankan BUMDes dikarenakan kurang siapnya desa dan potensi yang minim dari desa. Sebagaimana *Police Paper* Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) yang ditulis oleh Yunanto dkk

(2014:3-4) menjelaskan ada sejumlah kelemahan yang secara inheren ada pada BUMDes, yaitu:

1. Penataan kelembagaan desa belum berjalan secara maksimal sehingga BUMDes pun belum dilembagakan dalam format pemerintahan dan perekonomian desa.
2. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di desa untuk mengelola dan mengembangkan BUMDes yang akuntabel dan berkinerja baik.
3. Rendahnya inisiatif lokal untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga desa.
4. Belum berkembangnya proses konsolidasi dan kerjasama antar pihak terkait untuk mewujudkan BUMDes sebagai patron ekonomi yang berperan memajukan ekonomi kerakyatan.
5. Kurangnya responsivitas Pemda untuk menjadikan BUMDes sebagai program unggulan untuk memberdayakan desa dan kesejahteraan masyarakat (<http://www.upstegal.ac.id/>).

Masalah mengembangkan usaha milik desa juga menjadi lebih rumit karena sebagian besar usaha mikro kurang difasilitasi oleh akses modal, informasi, pasar, teknologi dan faktor-faktor pendukung bisnis lain (Sudaryana, Bambang, 2016).

Meskipun masih banyak ditemukan kendala, namun pembentukan BUMDes ini merupakan keharusan bagi desa-desa dalam rangka peningkatan perekonomian desa sejak diberlakukannya <sup>1</sup> Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sejak saat itu pemerintah mendorong dan memfasilitasi pendirian BUMDes di seluruh desa di penjuru nusantara. Lahirnya UU Desa tersebut membuat Kepala Desa dan jajaran-nya membutuhkan waktu untuk mempelajari peraturan-peraturan terkait berbagai peran dan tanggung jawab baru berkaitan dengan datangnya BUMDes di desanya. Sehingga tujuan menjadikan desa sebagai *center of development* benar-benar menjadi suatu hal yang nyata bukan hanya sekedar wacana.

Dengan adanya BUMDes masyarakat desa diharapkan dapat mengembangkan inovasi sesuai dengan potensi dan kekuatan daerahnya sehingga pada gilirannya desa akan memiliki daya saing atau keunggulan kompetitif. Banyak desa di Indonesia yang telah

berhasil mengembangkan inovasi dan meningkatkan perekonomian masyarakat sejak dibentuknya BUMDes. Dalam rangka mendorong perkembangan inovasi desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) secara pro aktif telah memunculkan program inovasi Desa yang mendorong dan memfasilitasi peningkatan kapasitas Desa yang diorientasikan pada RPJM Kementerian Desa.

Hingga akhir 2018 jumlah BUMDES telah mencapai 41.000 yang tersebar di 74.957 desa di Indonesia (sekitar 65%). Jumlah ini masih diharapkan terus bertambah sehingga setiap desa memiliki *center of economic development*. Namun demikian fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua BUMDes yang telah terbentuk memiliki perkembangan yang bagus. Bahkan pihak Kementerian Desa menyebutkan bahwa hampir 50% dari BUMDes tersebut tidak berkembang atau mati suri. Hal itu dikarenakan karena minimnya kemampuan pengelola serta lemahnya pembinaan dari aparat desa.

BUMDEs sebagai sebuah inovasi bagi kehidupan ekonomi masyarakat desa tentu saja seperti inovasi lainnya memerlukan proses difusi inovasi agar sebuah perubahan atau inovasi dapat diterima dan didukung oleh seluruh stakeholder desa khususnya masyarakat desa itu sendiri. Sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih jauh bagaimana pemerintah dan masyarakat desa tersebut mampu berproses untuk mendirikan suatu badan usaha yang notabene merupakan hal baru bagi mereka. Penelitian ini difokuskan untuk mengembangkan model proses difusi inovasi desa khususnya dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes sehingga dapat digunakan untuk menyusun model pelebagaan inovasi desa yang lebih efektif.

## **2. Model dan Strategi Difusi Inovasi Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Badan Usaha Milik Desa**

Model proses difusi inovasi diperlukan untuk menjelaskan bagaimana sebuah inovasi dan pembaharuan dapat diterima ataupun ditolak oleh individu maupun kelompok sosial tertentu. Sehingga dengan adanya model proses difusi inovasi ini akan membantu para implementor inovasi kebijakan untuk mendifusikan kebijakan atau program inovatif terutama

yang menyangkut masyarakat luas, mengingat banyaknya variable yang dapat menjadi kendala dalam proses penerapan inovasi kebijakan dan atau inovasi sosial.

Proses difusi inovasi pada individu tentu akan berbeda dengan inovasi untuk kelompok masyarakat yang lebih kompleks karakteristik individunya. Program inovasi yang berupa rekayasa sosial (*social engeneering*) akan menghadapi tingkat kompleksitas yang tinggi dari aspek penerima program inovasi, mengingat program inovasi yang diusulkan tentu memerlukan kerjasama, partisipasi dan komitmen dari seluruh elemen kelompok atau masyarakat penerima manfaat inovasi tersebut. Roesmidi (2006, hlm. 10) menyatakan bahwa partisipasi berlaku sebagai suatu instrumen untuk kegiatan memobilisasi, mengorganisir, dan mengembangkan yang dilakukan oleh rakyat sebagai pemecah masalah yang utama di lingkungan sosial mereka.

Salah satu persoalan yang masih menyebabkan terjadinya stagnasi inovasi kebijakan publik adalah masih dominannya peran leader atau pemimpin, ketergantungan bawahan terhadap leader membuat seluruh sistem tidak berjalan seperti yang diharapkan, bawahan cenderung pasif dan kurang melakukan inisiatif dan berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan. Primemover perubahan adalah terletak pada pucuk pimpinan dalam hal ini Kepala Desa. Ketika Kepala desa kurang berinisiatif maka perangkat desa lainnya serta masyarakat desa pada umumnya cenderung akan bersikap pasif pula.

Sebagai sebuah lembaga profesional, BUMDesa harus mampu membangun sistem keorganisasian mandiri untuk menjalankan seluruh prosesnya sebagai lembaga usaha. Peran kepala desa adalah mendorong terciptanya BUMDes sebagai lembaga yang mampu secara profesional mengelola seluruh proses usaha dan memastikan proses itu berjalan dengan baik. Maka tidak berarti kepala desa boleh menentukan segala sesuatu yang harus dilakukan BUMDes. Hal ini dikarenakan BUMDes adalah lembaga usaha yang memiliki pertimbangan sangat berbeda dengan lembaga pemerintahan dalam mengambil sebuah keputusan.

Konsep BUMDes berbeda dengan program pemberdayaan ekonomi lainnya. BUMDes mengharuskan partisipasi warga desa dalam seluruh proses kelahiran BUMDes. BUMDes juga mengharuskan dirinya ditangani orang-orang yang dipilih karena kapasitasnya dan bukan

berdasar kedekatan personal dengan penguasa desa atau karena dulu kalah dalam Pilkades. Karenanya pemilihan pengurus BUMDes tidak boleh asal tunjuk saja.

Berikut adalah beberapa faktor yang mendorong keberhasilan proses difusi inovasi BUMDes di Desa Panggunharjo:

- **Facilitative Leadership**

Peran kepala desa dalam pengelolaan BUMDES lebih merupakan fasilitator ketimbang atasan terhadap bawahannya. Pada semua desa yang BUMDESnya berhasil ternyata dipimpin oleh Kepala Desa yang penuh inisiatif dan inovatif. Bahkan hampir seluruh informan sepakat menyebut Kepala Desa sebagai seorang innovator sejati. Karena ide-ide kreatif yang dijalankan oleh BUMDes pada umumnya merupakan gagasan atau dorongan dari Kepala Desa.

- **Transparansi dan Komunikasi**

Salah satu prinsip yang dipegang teguh oleh kepala desa adalah pentingnya transparansi dalam menjalankan pemerintahan desa. Transparansi tercipta melalui komunikasi intensif dan suasana penuh kekeluargaan. Komunikasi kekeluargaan tidak hanya dibangun diantara perangkat desa tetapi juga dengan seluruh elemen pemerintahan desa yaitu BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada. Sehingga suasana kondusif dapat tercipta jauh dari konflik kepentingan dan kekuasaan. Transparansi ini dilakukan untuk semua aspek termasuk gagasan awal pembentukan BUMDes dikomunikasikan secara transparan. Dengan demikian semua unsur dapat memahami dan menerima gagasan tersebut dengan baik. Kunci sukses agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berjalan dengan baik adalah transparansi pengelolaan yang dilakukan pengurus. Transparansi ini sangat penting sehingga pengelolaan dapat terbuka dan setiap orang dapat ikut melakukan pengawasan.

- **Institutional design**

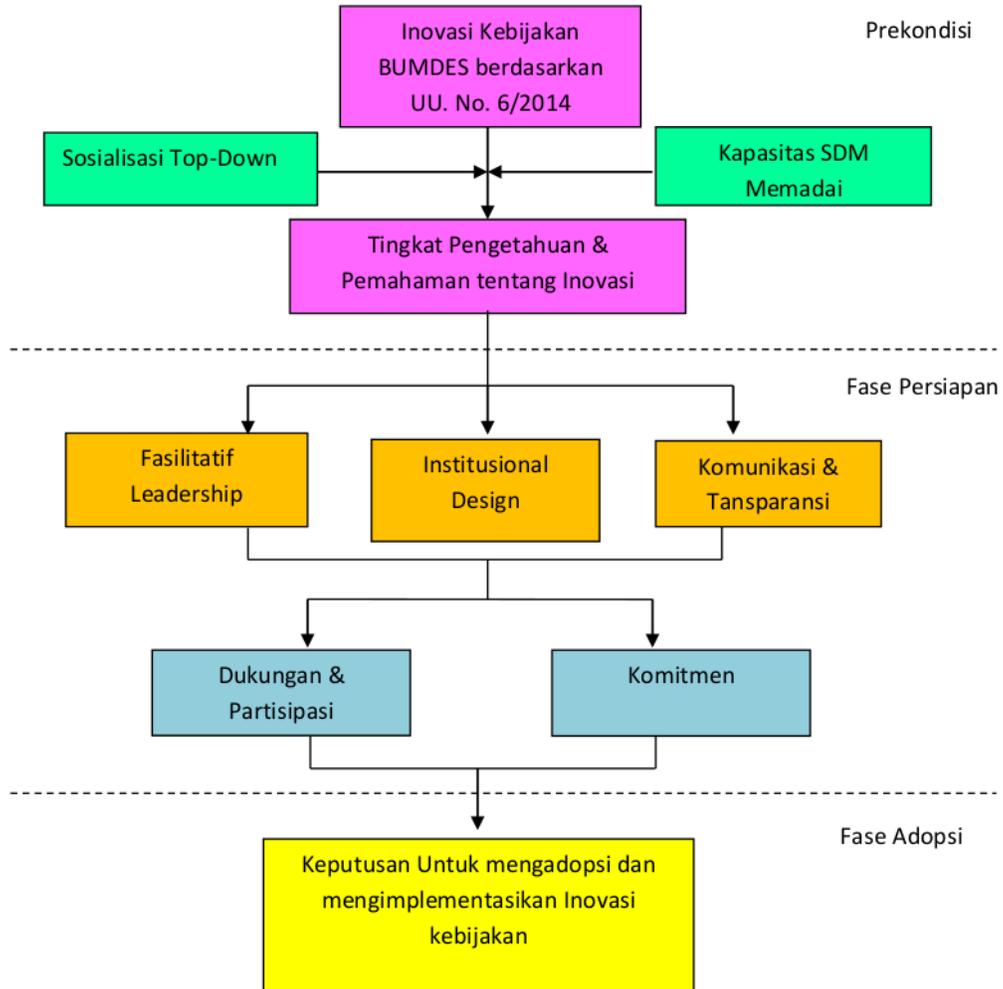
Pembagian tugas dan wewenang serta alur komunikasi antar pengurus serta koordinasi dengan pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) serta lembaga kemasyarakatan lainnya telah diatur sedemikian rupa tertib dan kondusif. Tugas, hak dan kewajiban masing-masing pemangku kepentingan telah diatur secara resmi berdasarkan kesepakatan bersama. Dialog yang dilakukan antara pemangku kepentingan berjalan dengan lancar dan efektif,

dikarenakan sudah jelas tujuan dan manfaat yang akan didapat oleh masing-masing pemangku kepentingan.

- **Collaborative process**

Ansell dan Gash (2007) menggambarkan proses kolaborasi ini dapat berlangsung secara siklus, mulai dari dialog *face to face*, *trust building*, *commitment to proses*, *shared understanding*, *intermediate outcomes* yang kemudian perlu dilakukan dialog lagi untuk mengevaluasi efektivitas kolaborasi dan menentukan apakah kolaborasi akan berlanjut atau tidak. Dialog antara pemangku kepentingan telah sepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain dengan tujuan yang dirumuskan secara transparan. Faktor kedua yang juga tidak kalah penting yaitu komitmen dan dukungan seluruh pengurus BUMDES dan semangat bekerja yang sangat tinggi. Faktor ketiga yaitu dukungan dan partisipasi masyarakat yang mau menjalankan semua arahan dari perangkat desa dan pengurus BUMDES untuk disiplin dan mengubah perilaku masyarakat. Dengan adanya pemahaman yang sama antara perangkat desa, pengelola BUMDES, dan seluruh stakeholders maka seluruh program BUMDES dapat berjalan dengan baik.

Berikut adalah visualisasi model difusi inovasi BUMDes analisis penulis:



### Keterangan Model

Tahap prekondisi dalam hal ini adalah suatu proses yang terjadi di luar kehendak kelompok masyarakat yang akan menerima inovasi. Dalam konteks inovasi kebijakan tentang BUMDes ini maka keberadaan kebijakan yaitu Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 menjadi substansi inovasi itu sendiri yang oleh Pemerintah Pusat selaku pembuat kebijakan disosialisasikan kepada Pemerintahan di bawahnya hingga pada level sasaran yaitu pemerintah Desa. Pada waktu bersamaan, proses komunikasi atau sosialisasi yang diberikan dengan berbagai saluran komunikasi yang digunakan akan ditangkap oleh pihak yang menerima sosialisasi yaitu dalam hal ini adalah Kepala Desa beserta Perangkat desa lainnya. Tujuan dari komunikasi dan sosialisasi tentunya adalah pembentukan pengetahuan dan pemahaman pihak penerima informasi. Tingkat pengetahuan dan pemahaman itu sendiri akan terbentuk bukan hanya dipengaruhi oleh strategi komunikasi dan sosialisasi yang digunakan tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas dan kemampuan SDM yang menerima informasi sehingga masing-masing individu tidak akan menghasilkan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang sama satu sama lain.

Selanjutnya fase persiapan, fase ini berlangsung setelah terbentuknya pengetahuan dan pemahaman tentang substansi inovasi kebijakan yang dikomunikasikan. Kemudian pihak penerima informasi dengan tingkat pengetahuannya akan melakukan beberapa aksi sebagai bentuk aktif dari pemahaman yang telah mereka miliki. Aktor yang paling berkompeten dengan inovasi BUMDes ini adalah Kepala Desa. Atau dalam konteks implementasi kebijakan publik, kepala desa adalah implementor utama dari [Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa](#) dan [Peraturan Pemerintah \(PP\) Nomor 47/2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa](#).

Kapasitas Kepala desa mewakili variabel sumber daya khususnya sumber daya manusia (SDM) yang mana sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yang dalam hal ini adalah tentang pembentukan BUMDes. Secara riil faktor utama yang menentukan keberhasilan proses difusi inovasi adalah kapasitas si penerima informasi yaitu kepala desa dan jajarannya. Karena kapasitas SDM akan menentukan tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang inovasi

dan bagaimana menerapkannya. Dalam hal ini diperlukan pemimpin yang mampu memahami dan menyerap informasi tentang manfaat dan keuntungan jika menerapkan inovasi tersebut dalam waktu yang relative singkat. Pemimpin dituntut berperan sebagai inisiator dan sekaligus sebagai fasilitator bukan sebagai implementor. Karena BUMDes adalah lembaga yang mandiri dan professional dalam menjalankan bisnis dan tidak bisa diintervensi oleh kepentingan kekuasaan tertentu, walaupun dalam proses pembentukannya kepala desalah yang paling banyak berperan. Pada tahap ini, banyak ide dan gagasan kreatif namun realistic yang perlu dimunculkan. Kerealistisan gagasan yaitu ide unit usaha yang dikembangkan hendaknya yang berbasis potensi lokal.

Selanjutnya masih terkait dengan kapasitas SDM, kepala desa dengan kemampuan manajerialnya dituntut menggerakkan seluruh elemen pemerintahan desa secara partisipatif untuk menyusun rencana implementasi inovasi. Dalam konteks teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones, terdapat 3 fase implementasi kebijakan yaitu tahap interpretasi, organisasi dan aplikasi. Maka tahap *instutional design* ini hampir sama dengan tahap pengorganisasian. Pada tahap ini kepala desa bersama jajarannya dan seluruh pemangku kepentingan desa tersebut secara partisipatif merancang organisasi BUMDes beserta kejelasan tugas pokok, fungsi dan kewenangan kelembagaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kejelasan rancangan organisasional ini akan mendorong warga masyarakat untuk menerima inovasi karena sudah memiliki gambaran yang konkrit bagaimana inovasi tersebut akan diterapkan. Sebaliknya apabila tahap institusional design ini tidak berhasil dirumuskan dengan jelas maka kemungkinan difusi inovasi kurang berjalan dengan baik karena minimnya keyakinan dan kepercayaan masyarakat akan manfaat BUMDes.

Setelah variabel institusional design, variabel berikutnya adalah komunikasi dan transparansi. Segala sesuatu terkait ide, gagasan, desain kelembagaan, rencana struktur kepengurusan hingga rencana penganggarannya perlu dikomunikasikan secara transparan kepada seluru pemangku kepentingan di desa tersebut. Hal ini untuk menghindari adanya penyimpangan kepentingan selain hanya untuk kepentingan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu inovasi hendaknya dapat memberi manfaat bagi

semua pihak baik pemerintah desa, masyarakat dan semua pihak yang terkait (stakeholders) yang tentunya harus dibangun atas dasar tujuan bersama yang saling menguntungkan. Dengan adanya komunikasi dan transparansi, maka semua pihak akan mendapat informasi yang proporsional dengan harapan dapat mempermudah proses difusi dan penerimaan inovasi. Adopsi inovasi juga dipengaruhi oleh keyakinan terhadap kemampuan seseorang. Sebelum seseorang memutuskan untuk mencoba hal baru, orang tersebut biasanya bertanya pada diri mereka sendiri apakah mereka mampu melakukannya. Jika seseorang merasa mereka bisa melakukannya, maka mereka akan cenderung mengadopsi inovasi tersebut. Selain itu, dorongan status juga menjadi faktor motivasional yang kuat dalam mengadopsi inovasi.

Dengan komunikasi dan transparansi yang dibangun, maka diharapkan akan terbentuk dukungan dan partisipasi dari seluruh stakeholders. Dukungan dan partisipasi stakeholders sangat diperlukan untuk meyakinkan sekali lagi apakah keputusan yang nantinya akan diambil benar-benar menjadi keputusan bersama. Bentuk dukungan dan partisipasi pemangku kepentingan ini dapat dalam bentuk aktif maupun pasif. Dalam bentuk aktif antara lain dengan memunculkan ide-ide dan gagasan yang mendorong percepatan adopsi inovasi. Sedangkan dalam bentuk pasif, paling tidak pemangku kepentingan yang kurang sependapat tidak melakukan aksi-aksi yang dapat mengganggu penerimaan dan penerapan inovasi. Simultan dengan adanya variable dukungan dan partisipasi, maka akan terbentuk komitmen, yaitu merupakan pengakuan seutuhnya, sebagai sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri seseorang. Komitmen sangat diperlukan bagi pengambilan keputusan untuk menerima inovasi dan menerapkannya dengan sungguh-sungguh.

Fase selanjutnya atau fase terakhir dalam proses Difusi Inovasi Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Badan Usaha Milik Desa adalah keputusan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan inovasi kebijakan yaitu pembentukan BUMDes. Setelah melalui tahap prekondisi dan tahap persiapan, maka pada tahap adopsi inovasi akan lebih lancar dan kegiatan atau aktivitas BUMDes yang dibentuk akan benar-benar berkesinambungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Armenakis, A.A., Harris, S.G. & Feild, H.S. 1999. Paradigms in organizational change: Change agent and change target perspectives. In R. Golembiewski (Ed.), *Handbook of Organizational Behavior*, 631-658
- Choe, KyeongAe. Roberts Brian. 2011. *Competitive Cities In The 21st Century*. Urban Development Series. AusAID
- Conner, D.R. 1992. *Managing at the speed of change: How resilient managers succeed and prosper where others fail*. New York: Villard Books
- Georgopolous dan Tannenbaum. 2003. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Greenwood, D. 2003. Participatory Action Research. *Encyclopedia of Social Science Research Methods*. Thousand Oaks, CA: Sage Reference Online. Web.
- Hanafi, Abdillah. 2009. *Memasyarakatkan Ide-ide Baru*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Meiliana, et al. 2010. *Efektivitas perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan PKPIIA3*. Lembaga Administrasi Negara Samarinda.
- Payne, G. and J. Payne. 2004. *Key Concepts in Social Research*. London: Sage.
- Rogers, Everett M.. 1983. *Diffusion of Innovations*. London: The Free Press.
- Roesmidi, H. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jatinangor: ALQAPRINT.
- Taufik, Tatang. 2005. *Pengembangan Sistem Inovasi Daerah: Perspektif Kebijakan*. Tangerang: Buana Press
- Vasilevska, Ljiljana. 2010. *Rural Development And Regional Policy – Conceptual Framework* .

### Jurnal

- Abdullahi I. Musa, Gbaje S. Ezra dan Mohammed F. Monsurat. 2015. Perceived Attributes of Diffusion of Innovation Theory as a Theoretical Framework for understanding the Non-Use of Digital Library Services. *Information and Knowledge Management*. Vol.5, No.9, [www.iiste.org](http://www.iiste.org)

- Ahmad, Rizal, 2016. Difusi Inovasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Akan Kelestarian Lingkungan, *Sosietas* Vol. 6 Nomor 2, September.
- Ansorudin. S. M. 2007. Difusi Inovasi Teknologi Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat. Difusi Inovasi; *Jurnal Teknik Lingkungan*.8 (3), hlm.253- 260.
- Astuti, SJW. 2005. Peluang dan Tantangan Penerapan e-Governance dalam konteks Otonomi Daerah. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. Vol.XVII No.2.Pp. 93-110.
- Astuti, SJW dan Dwi Wahyu Prasetyono. 2017. Inovation Development To Increase Local Competitiveness in Mojokerto Regency, Policy and Governance Review, Vol. 1 No. 3, Pp. 189-200.
- Arisandi, Rachman Sidharta. 2008. Efektifitas Musrenbang dalam pembangunan partisipatif, *Emas : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*. Universitas Mayjen Sungkono. Vol.2.No.1. Pp.64-74.
- Coetsee, L. 1999. From resistance to commitment. *Public Administration Quarterly*, 23, 204-222.
- Conner, D.R. & Patterson, R.W. 1982. Building commitment to organizational change. *Training and Development Journal*, 36, 18-30.
- Handayani, Wiwandari, dkk, 2012, Kajian Pengembangan Sistem Inovasi daerah (SIDa) di Kota Semarang, *Riptek* Vol. 6, No.2, Tahun 2012, Hal.: 1 – 16.
- Herscovitch, L. & Meyer, J.P. 2002. Commitment to organizational change: Extension of a threecomponent model. *Journal of Applied Psychology*, 87, 474-487
- Jeddawi, Murtir. 2009. *Peranan Birokrasi Dalam Meningkatkan Daya Saing dan Investasi Di Daerah*. Media Riset Bisnis dan Manajemen Vol 9 No. 1 April 2009
- Kaminski, J. Spring 2011. Diffusion of Innovation Theory *Canadian Journal of Nursing Informatics*, 6(2). Theory in Nursing Informatics Column. <http://cjni.net/journal/>
- Kijek, Arkadiusz dan Kijek, Tomasz, 2010, Modelling of innovation diffusion, *Operations Research And Decisions*, No. 3–4, pp. 53-68.
- Klein, K.J. & Sorra, J.S. 1996. The challenge of innovation implementation. *Academy of Management Review*, 21, 1055-1080

Lei, M.W. 2016. Determinants of IT Innovation Diffusion from Dynamic Perspective — Review and Prospects. *Technology and Investment*, 7, 1-7. <http://dx.doi.org/10.4236/ti.2016.71001>

Porter, Michael. 2003. The Economic Performance of Regions, *Regional Studies*, Vol. 37.6 &7, pp. 549–578, August/October (diunduh dari [www.academia.edu/2917967/The\\_economic\\_performance\\_of\\_regions](http://www.academia.edu/2917967/The_economic_performance_of_regions), 2 Agustus 2016.

Sanni, S.A., et al., 2013. Using the Diffusion of Innovation Concept to Explain the Factors That Contribute to the Adoption Rate of E-journal Publishing, *Serials Review*. <http://dx.doi.org/10.1016/j.serrev.2013.10.001>

Sudaryana, Bambang, 2016, *The Model of Development Policy Implementation of Village Owned Enterprises In Indonesia*, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, volume 81 1st International Conference on Social and Political Development (ICOSOP).

Tafria, Desril. 2010. Efektivitas Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Kota Padang Di Era Otonomi Daerah, *Wacana* Vol. 13 No. 1 Januari 2010.

Zulham,Armen. 2013. Alternatif Model Kelembagaan Refine: Model Inovasi Kelembagaan Klinik Iptek Mina Bisnis. *Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. Vol.3 No.1.Pp. 97-106.

### **Website**

Caiazza, Rosa, 2018, What Supports the Adoption of Innovations Within Established (non-frontier) Firms?, *SOTA Review* No 5: September, <https://www.enterpriseresearch.ac.uk/wp-content/uploads/2018/09/No5-SOTA-What-supports-the-adoption-of-innovations-within-established-non-frontier-firms.pdf> (Diakses 2 Nopember 2018)

Karakaya, Emrah, 2015, *Diffusion of dynamic innovations: A case study of residential solarsystems*,<http://www.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A869864&dswid> (Diakses 14 Nopember 2018)

Saiful. 2011. Proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Birem Bayeun pada BAPPEDA Kabupaten Aceh Timur. <http://www.pustaka.ut.ac.id>. diakses 09 April 2013.

- Santoso, Urip. 2012. *Peranan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam percepatan pembangunan daerah*. <https://www.slideserve.com/>.
- Sigit. 2011. Peran Sistem Informasi Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah ( Suatu Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan). <http://elibrary.ub.ac.id>. diakses 09 April 2013
- Webster, Douglas. The Canadian Encyclopedia, <http://www.thecanadianencyclopedia.com/>. Diakses 23 April 2013.
- Yalina, Nita. 2011. Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Menggunakan Metode Tam, <http://library.its.ac.id>, diakses 2 April 2013
- Wahyu Mulyana, 2013. <http://www.beritasatu.com>. Diakses 09 Mei 2013
- Majalah Manajemen Edisi Juni – Juli 2015, PPM Manajemen, Jakarta
- Yunanto, (2014) <http://desamembangun.or.id/2014/04/strategi-pengembanganbumdes-sebagai-pilar-ekonomi-desa> 2 Februari 2015 (17:00)

# Model Sistem Responsibilitas Dan Akuntabilitas “Gapura Kota Model”

## ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

6%

2

[www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)

Internet Source

3%

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 3%